

MEMBAGUN DEMOKRASI BERKEADABAN DAN DINAMIKA PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG 2019

Hadi Karyono*

ABSTRACT

Building democracy is not something easy, democracy as a political system has become the choice of our founding fathers. Democracy to this day is still considered to be the best political system of the political system that has ever existed. As the best political system, democracy must be cared for and fostered in order to thrive in our country, the Republic of Indonesia. However, at present, there are many efforts that distort democracy. SARA politics developed by certain groups for example. Besides the hoax news that is repeatedly spread so that it is considered a truth. This ultimately made people including millennials confused. This paper aims to explore more deeply how to build a democratic democracy and the dynamics of the 2019 presidential election. In this paper the literature research method is used. In the discussion it can be concluded that the challenge of the 2019 general election is: how to deal with challenges ahead of the 2019 general election in Indonesia to implement an effective political constellation to build political stability.

Keywords : democracy, justice and presidential election.

PENDAHULUAN

Pembaharuan atau reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk mencapai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembaharuan dalam bidang politik salah satunya membangun demokrasi.

Membangun demokrasi yang sehat adalah membangun demokrasi peradapan kehidupan yang lebih baik, dalam kehidupan demokrasi yang baik dan sehat maka mensyaratkan antara lain adanya persamaan dalam kedudukan di muka hukum serta partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan-keputusan. Pemilihan Umum Presiden 2019 sesungguhnya

merupakan wahana demokrasi dalam upaya membangun peradapan yang lebih baik dimana rakyat ditempatkan tertinggi dalam kedudukannya (*Supremasi*) dalam pengambilan keputusan-keputusan, keputusan dalam hal ini adalah Pemilihan Umum Presiden sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

“Pemilihan Umum yangselanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹

* Hadi Karyono adalah Pengajar di Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Bidang Kajian Hukum Tata Negara sekaligus pengamat dibidang Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Sekarang sedang menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum UNTAG Semarang dapat di hubungi melalui email: karyonohadi08@gmail.com

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2017

Pemilihan Presiden 2019 adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat, hal ini sebagaimana perintah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Dari harapan tersebut di atas kita seharusnya mampu membangun demokrasi yang berkeadaban, yaitu demokrasi yang membawa kebaikan dan keluhuran serta kesejahteraan masyarakat (*welfare state*) yang seharusnya menjadi prioritas. Berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2019 seharusnya masing-masing calon Presiden dan tim relawannya memberikan program dan harapan masyarakat untuk lebih baik lagi lima tahun mendatang dengan berdasarkan struktur capaian pemerintahan sebelumnya. Namun, saat ini, banyak muncul upaya yang mendistorsi demokrasi. Politik SARA banyak dikembangkan oleh kelompok tertentu. Selain itu berita-berita hoaks yang berulang kali disebar sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hal ini akhirnya membuat masyarakat termasuk kaum milenial menjadi bingung. Apakah itu dikatakan sebuah demokrasi? Dalam arti yang sempit, memang bisa dikatakan sebuah demokrasi, karena demokrasi berarti adanya kebebasan mengungkapkan pendapat. Padahal esensi demokrasi seharusnya mengandung nilai-nilai keadaban, yang menjunjung tinggi sopan santun, yang sudah menjadi milik bangsa ini sejak ratusan tahun lalu.²

Demokrasi berkualitas mesti dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagi sebagian orang musyawarah mufakat bukan merupakan demokrasi, padahal musyawarah dan mufakat itu adalah sebuah demokrasi. Mari kita berdemokrasi dalam sebuah politik yang beradab, kita tidak boleh terpecah belah oleh isu mayoritas dan minoritas yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu. Dari paparan tersebut di atas maka penulis mengangkat permasalahan bagaimana membangun politik berkeadaban dan dinamika pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia untuk melaksanakan konstestasi politik yang efektif guna membangun keamanan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan penelusuran dan pencarian dokumen dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi bahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengelompokkan data yang bersifat kualitatif. Metode ini menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, memahami alur peristiwa secara kronologis, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai teori yang ada. Obyek yang diteliti yaitu diskripsi bangunan demokrasi dan dinamika menjelang pemilihan umum presiden 2019.

2 Hargo, "Membangun Demokrasi Berkeadaban Dengan Berbasis Kearifan lokal", <http://indonews.id/artikel/17179/Membangun-Demokrasi-Berkeadaban-yang-Berbasis-Kearifan-Lokal/>

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demokratia* yang merupakan salah satu kata dari bahasa Yunani. Demokrasi sendiri memiliki arti suatu kekuasaan rakyat. Adapun secara umum, demokrasi terbagi menjadi dua kata, pertama adalah kata *Demos* yang maknanya adalah rakyat. Dan kedua adalah *kratos* yang maknanya adalah kekuatan atau kekuasaan.³ Pengertian demokrasi dari para ahli antara satu dengan yang lain juga tidak sama.⁴

1. Pengertian dari demokrasi berdasarkan pendapat Abraham Lincoln merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat itu sendiri.
2. Pengertian dari demokrasi berdasarkan pendapat Charles Costello merupakan suatu sistem sosial dan juga politik pemerintahan dimana di dalamnya kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak perorangan dari warna Negara itu sendiri.
3. Sementara pengertian dari demokrasi berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen merupakan suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Adapun mengenai pelaksana kekuasaan Negara sendiri adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat sesudah adanya suatu keyakinan bahwa kebutuhannya akan memperoleh perhatian di dalam aturan yang telah atau akan ditetapkan oleh wakil rakyat tersebut berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan Negara.

Dari pengertian demokrasi tersebut kita dapat mengambil prinsip bahwa demokrasi harus ada beberapa kondisi yang

tercipta sebagai berikut:⁵

1. Adanya suatu kebebasan yang telah disepakati, diakui serta disetujui oleh tiap warga Negara.
2. Adanya keikutsertaan dari masing-masing warna Negara di dalam melaksanakan dan juga menentukan suatu keputusan yang sifatnya politik.
3. Adanya kesetaraan dan keadilan untuk tiap warga Negara.
4. Tiap warna Negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktik politik.

Membangun Demokrasi Berkeadaban

Membangun demokrasi berkeadaban pada prinsipnya adalah membumikan esensi demokrasi dengan didasarkan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kemudian secara yuridis konstitusional dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian kita kenal sebagai landasan yuridis konstitusional permanen. Negara kita sesungguhnya sudah berulang kali dalam berdemokrasi, namun demokrasi itu sendiri terus mengalami dinamika pasang surut sejak zaman orde baru sampai orde reformasi. Pada beberapa kemajuan dalam berdemokrasi pada decade terakhir ini mengalami kemajuan cukup berarti sekalipun banyak juga gelombang dahsyat yang mengawatirkan, yaitu adanya dunia maya (medsos) yang terus menggoyang dengan berita yang tidak benar (hoax). Namun dengan adanya empat prinsip yang telah disepakati oleh semua pimpinan lembaga Negara dalam pembangunan demokrasi hal ini bisa terkendali. Empat prinsip yang disepati tersebut adalah:⁶

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara

3 <https://moondoggiesmusic.com/pengertian-demokrasi/>

4 *ibid*

5 *ibid*

6 <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-4-pilar-kebangsaan.html>

- Republik Indonesia Tahun 1945
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Bhineka Tunggal Ika

Dari prinsip tersebut tentu merupakan suatu pondasi yang dibangun dengan penuh perjuangan oleh para pendiri bangsa kita ini. Sehingga empat pilar yang di cetuskan oleh pendiri Bangsa diharapkan mampu menjadikan setiap pimpinan di lembaga kenegaraan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dialami oleh bangsa ini.

Sebagai rakyat, tentu saja semuanya mengharapkan semua dapat berjalan dengan seimbang sehingga kondisi kehidupan bernegara dan berbangsa menjadi sangat harmonis. Adanya empat pilar itu sudah mencukupi jika segenap masyarakat dan juga jajaran pemerintahan bersedia untuk mempraktikkan hal itu secara baik dan tulus. Dengan demikian, bangunan demokrasi Indonesia menjadi kokoh dan di kemudian hari akan berhasil menjadi sebuah negara yang besar dan mempunyai kedaulatan disemua bidang secara penuh.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme memilih pemimpin pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu didalam lembaga-lembaga politik formal yakni, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat.⁷ Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan limatahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemimpin yang akan menduduki jabatan politik ialah orang-orang yang mempunyai kekuasaan

7 Darmawan.(2015).*mengenal ilmu politik*. Jakarta: PT.Gramedia, hal 144

terhadap arah kebijakan dimasa mendatang terhadap negeri didaerah maupun dipusat yang mempunyai pengaruh jabatan politik yang dimana dipilih melalui alat atau mekanisme rakyat untuk memilih pemimpin. Ada beberapa fungsi pemilihan umum yaitu :⁸

1. Fungsi Perwakilan Politik

Prosedur rakyat dalam memilih dan mengawasi pemerintah. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Wakil-wakil itu akan menjalankan kedaulatan yang didelegasikan kepadanya. Pemilu merupakan proses pemungutan suara secara demokratis untuk seleksi anggota perwakilan dan juga organ pemerintahan. Fungsi ini sebagai fungsi perwakilan politik.

2. Legitimasi Politik

Pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memang menjadi pilihan rakyat sehingga memiliki keabsahan. Pemerintah yang absah akan merumuskan program dan kebijakan yang akan ditaati oleh rakyat. Rakyat akan tunduk dan taat sebagai konsekuensi atas pilihan dan partisipasi politik yang telah dilakukan. Dalam sistem demokrasi, kehendak rakyat merupakan dasar bagi keabsahan pemerintah. Suara rakyat merupakan dasar atas pemerintahan yang sah

3. Mekanisme Pergantian Elit Politik

Dengan pemilihan umum, rakyat dalam kurun waktu tertentu dapat mengganti elit politik dengan yang lainnya berdasarkan pilihannya. Putusan tersebut bergantung pada penilaian rakyat terhadap kinerja para elit politik di masa menjabat. Jika para elit politik tidak mampu

8 <https://mengakujenius.com/fungsi-pemilihan-umum/>

memenuhi syarat dan harapan-harapan rakyat, maka ia cenderung tidak akan dipilih lagi oleh rakyat yang kemudian menggantinya dengan elite politik yang baru dan dapat diandalkan.

4. Fungsi Pendidikan Politik

Pemilu juga berfungsi sebagai pendidikan politik bagi rakyatnya. Fungsi pendidikan politik melalui pemilu merupakan pendidikan yang bersifat langsung, terbuka, dan massal karena dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Melalui fungsi pendidikan politik inilah pemilu berperan sebagai sarana pengembangan budaya politik demokratis. Oleh sebab itu pemilu harus dilaksanakan secara demokratis demi mencegah budaya apatis dalam masyarakat. Budaya politik partisipan harus benar-benar diterapkan kekuasaan dan sumber daya yang tidak menyebar bahkan terpusat akan mengakibatkan sistem *autocracy* pada suatu negara tentu saja sistem *autocracy* ini sangat berbeda dengan demokrasi yang menginginkan rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi di sistem perpolitikan.

Pembahasan

Pemilihan Umum Presiden 2019 adalah sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat hal ini sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan

masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Pemilihan Umum Presiden 2019 adalah Pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia bersamaan dengan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tentu diwarnai dengan tantangan-tantangan yang akan terjadi dimasa kampanye sampai hari pemilihan. Pemilihan umum sebagai arena kompetisi tidak lepas dari berbagai kecurangan maupun ketidaksehatan dalam memenangkan kompetisi perolehan suara. Pemilihan umum Presiden 2019 yang diikuti dua kontestan yaitu nomor urut (01) Joko Widodo dan Ma'aruf Amin Vs nomor (02) Prabowo Subianto dan Sandiogo Unomelalui penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 tim relawan mulai melakukan pemanasan mesin politiknya masing-masing dengan berbagai manuver untuk membangun citra politiknya. Untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik ini maka berbagai upaya sekalipun dengan berbagai argumentasi logika yang salah (*logical fallacy*) mereka berusaha bagaimana memenangkan pertarungan untuk meraih kekuasaan.

Dinamika Isue Pemilihan Presiden 2019

Kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2019 resmi dimulai 23 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 13 April 2019. Kedua kubu, calon presiden petahanan Joko Widodo dan lawannya Prabowo Subianto, sudah mulai berkampanye mengemukakan janji-janji

politik mereka kepada calon pemilih. Hampir lima bulan masa kampanye berjalan, sering kita temukan banyak kekeliruan berlogika dalam argumen-argumen politik kedua kubu. Kekeliruan-kekeliruan tersebut dapat mempengaruhi logika cara berpikir yang terbalik, dan ini sering dikemukakan oleh para pendukung atau relawan yang berjibaku bahwa statment merekalah yang benar, padahal itu semua membolak balikan logika cara berpikir normal pada umumnya yang antara lain sbb :

1. Kampanye sarat pesan dengan logika salah.

Kekeliruan berlogika atau *logical fallacy* bisa kita maknai sebagai kesalahan dalam penalaran yang sering kali muncul karena ketidakmampuan seseorang menghasilkan pernyataan yang memenuhi kaidah argumentasi logis dalam proses penyimpulan kebenaran. Baik kubu Jokowi dan Prabowo sering kali mengeluarkan pernyataan dengan logika yang salah.

Jokowi dalam pidatonya pada 8 April 2018 pernah menyatakan bahwa: “Sekarang isunya ganti, Isu kaos Ganti presiden 2019. Ya kan? Pake kaos. Masak kaos bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat!”⁹ Dalam statmen tersebut, pentahana Jokowi mereduksi 'kaos' dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang akan secara fisik melakukan penggantian terhadap dirinya. Padahal para pengusung usulan gerakan #2019 ganti presiden memberikan simbol hanya makna kaos sebagai sebuah media fisik semiotika politik. Pertahanan Jokowi salah menginter prestasi, baik sengaja atau tidak sengaja, pokok utama argumentasi sehingga memudahkan dirinya untuk menyerang lawan.⁹ Ada kekeliruan yang menjadi focus

9 -----“*Banyaknya Sesat Pikir Dalam Pilpres 2019*” Akademi Ilmuan Muda Indonesia (ALMI) <https://theconversation.com/banyaknya-sesat-pikir-dalam-kampanye-pilpres-2019-104859>

dalam pembicaraan di sini yaitu perihal angka '1% menguasai 80% tanah Indonesia', tetapi juga masalah Prabowo yang membingkai sikap 'elite' pemerintah dengan kata 'tidak apa-apa'. Artinya 'elite' seolah-olah tidak berkeberatan atau tidak berbuat apa-apa atas kerugian negara. Apakah benar para elite pemerintah tidak peduli? Jika memang itu benar benar pernyataan tersebut, Prabowo bisa saja tidak melakukan kesalahan dalam berlogika. Tetapi kepedulian pemerintah terhadap aset negara apakah betul tidak peduli atau masih dalam ranah perdebatan yang tak selesai, sehingga tidak boleh disampaikan sebagai kemutlakan.

Prabowo juga tidak luput dari blunder. Dalam sebuah forum Prabowo berorasi dengan pernyataan: “Elite kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, tidak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, *ndak* apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian”¹⁰ Ada kekeliruan yang menjadi focus dalam pembicaraan di sini yaitu perihal angka '1% menguasai 80% tanah Indonesia', tetapi juga masalah Prabowo yang membingkai sikap 'elite' pemerintah dengan kata 'tidak apa-apa'. Artinya 'elite' seolah-olah tidak berkeberatan atau tidak berbuat apa-apa atas kerugian negara. Apakah benar para elite pemerintah tidak peduli? Jika memang itu benar benar pernyataan tersebut, Prabowo bisa saja tidak melakukan kesalahan dalam berlogika. Tetapi kepedulian pemerintah terhadap aset negara apakah betul tidak peduli atau masih dalam ranah perdebatan yang tak selesai, sehingga tidak boleh disampaikan sebagai kemutlakan.

10 *ibid*

2. Negative Campaign dan Black Campaign.

Dua istilah yang tidak asing di telinga masyarakat yaitu *negative campaign* dan *black campaign*, istilah ini terdengar sama namun sesungguhnya berbeda makna dan dampak hukumnya yang jauh berbeda. *Black campaign* adalah kampanye yang penuh kebohongan atau fitnah tentang lawan politiknya jadi tidak ada dasar faktanya, atau tidak ada fakta kejadian kemudian dibilang ada dan dikemukakan kepada semua orang ini yang dinamakan fitnah. Sedangkan *negative campaign* adalah kampanye yang mengkritisi sisi negative dan ini berdasar kan fakta yang ada, misalnya mengkritisi sisi kekurangan prestasilawan politik. *Black campaign* dapat dipidana sedangkan *negative campaign* tidak dapat dipidana. Dari dua model kampanye tersebut telah mewarnai dalam dinamika perpolitikan di Indonesiab bahkan dominasi *black campaign* tidak kalah banyaknya. Hasil riset peneliti ada kurang lebih 62 berita hoax yang sudah dilaporkan ke kepolisian sampai dengan bulan Desember 2018, sbb:¹¹

Laporan Isu Hoaks Bulan Agustus 2018:

- a. Dian Sastro dengan tagar ganti presiden.
- b. Voting Online KPU.
- c. Cina minta Jokowi jual Pulau Jawa dan Sumatra.
- d. Banser resmi dukung Prabowo Sandi.
- e. Survei kemenangan Prabowo.
- f. Putusan gugatan MK pada Pilkada Kab. Sampang.
- g. Pernyataan Sandiaga tidak yakin Indonesia raih juara di Asian Games 2018.
- h. Dukungan KH Said Aqil terhadap

11 62 berita hoax yang teridentifikasi Kominfo, <https://news.detik.com/berita/d-4368351/62-hoax-pemilu-2019-teridentifikasi-kominfo-ini-daftarnya>

- paslon Prabowo Sandiaga.
- i. Badai pasir terjadi karena spanduk #2019gantipresiden.
- j. Statement Sri Mulyani tantang pembenci Jokowi.
- k. Megawati setuju PKI bangkit.

Laporan Isu Hoaks Bulan September 2018:

- a. Pelaku bom bunuh diri di Surabaya masih hidup dan dukung 2019 ganti presiden.
- b. Mahasiswa Baru UMM Bentuk Formasi "2019 Ganti Presiden".
- c. Prabowo mempunyai utang sebesar Rp 17 triliun.
- d. TNI foto membentuk angka 2.
- e. PDIP Menerima Kunjungan PKI China.
- f. Jadi inilah sumber perpecahan di dalam gerakan tiganti.
- g. Akhirnya Najwa Shihab Dukung Prabowo-Sandi.
- h. Penambahan angka '0' dalam nomor urut pasangan capres-cawapres dituding akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara.

Laporan Isu Hoaks Bulan Oktober 2018:

- a. Dukungan GARBI kepada Jokowi.
- b. Ratna Sarumpaet Diancam Pemerintah.
- c. Presiden Pesta untuk menyambut para delegasi IMF di atas penderitaan korban bencana Palu.
- d. Rekening Gendut Jokowi di luar negeri yang tidak dilaporkan.
- e. Tulisan tagar 2019 Ganti Presiden di Kaos yang di bawa oleh Khabib Nurmagomedov.
- f. Pemerintah akan segera mengesahkan UULGBT.
- g. Berita gambar `Pegawai Kemenag Jember yang mengatakan bahwa PA 212 Muak dengan Prabowo.
- h. KH Ma'ruf Amin Mencium Pipi Wanita Bukan Muhrim.
- i. Surat pemanggilan KPK terhadap Kapolri Tito Karnavian.
- j. Kemendagri selundupkan 31 data pemilih baru.

- k. Timses Prabowo Sandi akan adakan CFD membiru pada 28 Oktober 2018.
- l. E-mail skenario Coklat.

Laporan Isu Hoaks Bulan November 2018:

- a. Broadcasting SMS/pesan WA Jokowi membagikan pulsa gratis.
- b. Kejamnya Rezim ini (pernyataan Presiden Jokowi terhadap 5 Guru Honorer yang meninggal dunia di Istana saat demonstrasi).
- c. PDIP minta seluruh pesantren ditutup.
- d. Cukong Cina Pendukung Jokowi.
- e. Hoaks Anak DN Aidit Melaporkan Pak Prabowo.
- f. Khofifah Indar Parawansa Masuk Timses Prabowo – Sandi.
- g. Foto seksi Grace Natalie.
- h. Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah.
- i. Foto Anggota Polri Siap Dukung Salah Satu Pasangan Capres-Cawapres.
- j. Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin.
- k. Jokowi dan Megawati Potong Tumpeng di atas Lambang PKI.
- l. Jika Menang, Jokowi Akan Ganti KH Ma'ruf Amin dengan Ahok.
- m. Atas Keinginan Jokowi, China Segera Kirim 3 juta Warganya ke Indonesia.

Laporan Isu Hoaks Bulan Desember 2018:

- a. Foto Prabowo di dinding pemimpin luar negeri.
- b. Puan Maharani buka posko logistik di reuni 212.
- c. "Nusron Wahid: "Kalau Peserta Aksi 212 Lebih dari Seribu Orang Ludahi Muka Saya".
- d. Karni Ilyas Dipanggil Jokowi Karena TV One Siaran Langsung Reuni Akbar 212.
- e. Surat Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk Pemenangan Pilpres 2019.
- f. Ma'ruf Amin sakit parah karena

- terjatuh.
- g. "JK selingkuh dukung no 2 menyelamatkan diri dari Partai PKI".
- h. Bupati Cianjur Mengarahkan RT RW Dukung Jokowi.
- i. Ancaman Pembunuhan pada Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi di Pilpres 2019.
- j. Puan "Jika Negara Ingin Maju dan berkembang, Pendidikan Agama Islam harus dihapus"
- k. Haleluya.... mari kita bersholawat kepada Nabi... (Dasar kamprettt..!!!).
- l. Museum NU di Surabaya Menjadi Rumah Pemenangan Prabowo-Sandi.
- m. Hoaks Simulasi Orang Gila Dibawa ke TPU.
- n. Hoaks PDIP bikin rusuh di Yogyakarta.
- o. Jokowi bagi-bagi uang di Ngawi pada Desember 2018.
- p. Pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS.

Diantara berita hoax yang paling menarik perhatian adalah kasus Ratna Sarumpet, kasus ini bermula dari ketika foto Ratna Sarumpet dengan wajah lebam tersebar. Mulanya Ratna disebut-sebut sebagai korban penganiayaan. Mendengar pernyataan dan kondisi Ratna pada saat itu para politisi yang berkoalisi di partai Gerindra dan para pemuka politisi pendukung kubu nomor urut 02 yakni Prabowo Sandi segera mengeluarkan pernyataan penudingan terhadap kubu nomor urut 01 yakni Jokowi dan KH Makruf Amin telah melakukan penganiayaan. Belakangan diketahui wajah lebam itu akibat operasi plastik. Berita hoax Ratna ini hampir sempurna bisa mengelabui opini masyarakat tentang kekejaman politik untuk menjatuhkan lawan politik yang lain. Menurut peneliti bahwa berita kebohongan Ratna yang kemudian berkembang seperti luncuran bola salju hingga sampai ke calon Presiden Prabowo yang mengadakan jumpa pers dengan statement telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia yang diduga

dilakukan oknum tertentu tidak lain adalah mengarah kepada lawan politik, namun kemudian setelah kepolisian menemukan fakta-fakta di lapangan yang berbeda, Ratna Sarumpaet kemudian mengakui kebohongannya dan meminta maaf atas kebohongan yang dilakukannya. "Bohong itu sebuah perbuatan yang salah, dan saya tidak punya jawaban bagaimana mengatasi kebohongan kecuali mengakui dan memperbaikinya," kata Ratna.¹²

Terhadap kasus hoax yang dilakukan Ratna sarumpaet yang menyeret para tokoh politisi telah mencerminkan adanya *black campaign* yang mana menuduhkan terlalu cepat untuk menjatuhkan lawan politik meskipun belum ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk menuding, lebih-lebih dengan adanya kejadian Ratna yang begitu cepat untuk melakukan konferensi pers yang dilakukan Prabowo untuk mengutuk pelaku penganiayaan terhadap Ratna dinilai kontennya menarik untuk menjatuhkan lawan politik hal ini termasuk dari *black campaign*.

Selanjutnya *black campaign* yang sering terjadi yaitu politik uang. Politik uang sering terjadi di Indonesia menjelang pemilu. Politik uang dijadikan pintu gerbang para pemilik modal untuk mendapatkan akses terhadap jabatan politik. Para pemilik modal melakukan perkawinan terhadap politik untuk menyelamatkan usaha mereka, untuk mengontrol kebijakan agar tidak merugikan mereka. Politisi yang terjun juga ada istilah mahar politik. Mahar politik ini dijadikan sebagai modal awal untuk meraih jabatan tertentu yang strategis dengan menyumbangkan uang kepada partai politik dan koalisi partai untuk memenuhi syarat mendapatkan jabatan tertentu. Momentum pilpres 2019 sarat dengan perkawinan politik dan bisnis yang bisa dilihat dari

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181003155248-20-335366/awal-cerita-ratna-sarumpaet-bohong-dipukuli-orang>

representasi capres dan cawapres melalui drama politik bahkan melibatkan tokoh-tokoh agama dalam penentuan cawapres untuk mendampingi Prabowo. Menurut peneliti pada pilpres 2019 ini sangat rentan dengan uang yang menjadi modal awal untuk mendapatkan jabatan politik. Hal ini dapat dilihat dari itjima ulama dengan jilid kesekian kali dan mengusung calon dari tokoh agama. Namun disisi lain itjima ulama tidak diindahkan oleh Prabowo dengan memilih Sandiaga Uno dengan berbagai isue yang mengikutinya. Sedangkan Joko Widodo yang tidak berdasarkan kepada itjima ulama, memilih KH. Makruf Amin sebagai cawapres yang sebelumnya digadangkan nama Prof Mahfud MD. Politik uang ini telah menghalalkan berbagai cara untuk meraih jabatan-jabatan tertentu, indikasi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai Golkar diduga juga dalam rangka politik uang dari pengusaha tertentu kepada politikus untuk serangan fajar. Untuk tetap menjaga marwah demokrasi maka pentingnya pendidikan politik terus didorong untuk mengeliminir *black campaign* dan *negative campaign*.

3. Membangun Demokrasi Yang Berkeadaban

Isue dinamika pemilihan umum Presiden berupa berita hoax sudah begitu masievs, masing-masing tim sukses dan relawan sudah saling berhadapan. Oleh karena itu harus ada kesadaran tinggi masing-masing elit untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi kegaduhan dalam Pemilihan Presiden salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Pada posisi demikian rakyat yang berdaulat harus cerdas dalam memilih.

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu yang meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu pendidikan politik bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan : membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.

Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode : dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik. Jika yang dimaksud dengan "Pendidikan" adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka "Pendidikan Politik" dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik, sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran

moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan social dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk menggeluti berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk atensi dan partisipasinya secara politik, sehingga mereka paham terhadap ideology politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya.

Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai factor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga Negara yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Ialah yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa.

Pendidikan politik dalam upaya mentransfer nilai-nilai ideologi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka generasi muda harus diberikan pemahaman ideologi negara yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia serta sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga pemimpin dari generasi muda yang terbentuk memahami kekuasaannya atas dasar ideologi negara secara benar.

Karena kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, maka perlu untuk dibatasi

kekuasaan itu. Cara membatasinya adalah dengan prinsip demokrasi konstitusional, bahwa “*Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.¹³

Prinsip ini berarti bahwa demokrasi kita harus didasari pada undang-undang dasar sebagai sumber hukum dasar, bukan pada politik atau kekuasaan belaka (*Rechtstaat* bukan *Machtstaat*). Hukum harus menjadi panglima dalam pelaksanaan demokrasi yang beradab ini.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang Pancasila yang adalah Dasar Negara dan juga merupakan Sumber dari Segala Sumber Hukum, maka pastinya Pancasila menjadi satu-satunya panglima dalam demokrasi yang beradab ini. Logikanya tidak ada lagi yang menjadi panglima dalam kehidupan politik Indonesia selain Pancasila. Pancasila menjadi satu-satunya konsensus rasional dalam mewujudkan keadaban negara bangsa Indonesia yang berbhineka.

Negara Indonesia yang berbhineka ini menerima Pancasila sebagai suatu kebenaran dalam demokrasi beradab, oleh karena itu toleransi diperlukan dalam mendukung terciptanya demokrasi beradab ini. Demokrasi yang beradab juga demokrasi yang menghargai hak orang lain tetapi sekaligus juga menjunjung tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga bangsa.

Role model demokrasi kita harusnya juga bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal bangsa kita yaitu musyawarah mufakat dan kegotong royongan, tidak tereduksi semata-mata pada mayoritas dan minoritas tetapi pada kesetaraan hak yang sama sebagai warga bangsa. Demokrasi yang beradab lebih mengedepankan pada semangat untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Demokrasi yang

mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan golongan / partai dan individu. Dimana semestinya para elit politik punya tanggung jawab untuk menjunjung tinggi etika / kesantunan dalam berpolitik, mengedepankan persatuan dan kesatuan, menjaga keberagaman serta merawat komitmen nilai-nilai kebangsaan.

Inilah bentuk demokrasi beradab yang harus kita bangun terus, dengan maksud tidak hanya sekedar membentuk pemerintahan yang berkuasa melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif, melainkan juga menciptakan suatu habitus baru dalam dunia politik untuk menuju pada keadaban baru negara bangsa yakni Indonesia Sejahtera.

Penutup

Membangun demokrasi yang berkeadaban bukanlah sesuatu yang mudah, dalam kontestasi politik 2019 masing masing tim sukses dan relawan saling menabuh gending perang yang bersaut-sautan, prinsip tim sukses dan relawan bagaimana membangun citra politik calon sekalipun dengan menyebarkan *negative campaign* ataupun *black campaign* alias berita bohong atau fitnah atau *hoax*. Berita *hoax* ini telah meracuni generasi milenial yang pemikirannya masih original dan berharap munculnya pemimpin yang amanah. Disamping itu berita *hoax* yang lebih berbahaya karena dibalut dengan isue SARA, berita-berita ini secara tidak sadar telah mengaduk-aduk emosi kalayak ramai dan lebih ekstrim dia akan menggerakkan seseorang melakukan segala cara seolah-olah atas nama agama, dan kalau tidak terkendali akan menimbulkan pertumpahan darah dan lebih parah lagi akan timbul binih-binih disintegrasi. Partai Politik sebagai pengusung calon dan kita semua seharusnya lebih waspada serta bertanggung jawab terhadap fenomena social yang ada. Pada situasi yang demikian ini maka pendidikan politik menjadi

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 2

penting dalam upaya untuk menjerenihkan marwah demokrasi dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, demokrasi yang berkeadaban adalah demokrasi yang mengedepankan etika dalam kehidupan tanpa melempar berita *hoax* atau fitnah yang dapat menimbulkan suasana ketegangan bahkan disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kehidupan yang lebih baik. Demokrasi berkeadaban adalah demokrasi yang tetap mengedepankan dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa indoneasia yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Membangun demokrasi berkeadaban juga membangun peradapan manusia agar hidup suasana saling menghargai sesama insan, jauh dari rasa ketakutan sehingga hidup dalam kedamaian di bumi Indonesia ini. Kematangan dalam demokrasi menjadi penting guna membangun kemapanan dalam kontestasi politik lima tahunan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Saddoen, "*Pengertian Demokrasi, Macam Macam, Ciri-Ciri, Prinsip Dan Contohnya*", <https://moondoggiesmusic.com/pengertian-demokrasi/>
- Darmawan. (2015), "*mengenal ilmu politik*". Jakarta: PT. Gramedia, hal 144 <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/mengenal-ilmu-politik>
- Hargo, "*Membanagun Demokrasi Berkeadaban Dengan Berbasis Kearifan lokal*", <http://indonews.id/artikel/17179/Membangun-Demokrasi-Berkeadaban-yang-Berbasis-Kearifan-Lokal/>
- Miriam Budhiharjo, (2003), "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" Gramedia Pustaka, https://books.google.co.id/books/about/Dasar_Dasar_Ilmu_Politik.html?hl=id&id=_dZ247rCydIC
- "*4 Pilar Kebangsaan Indonesia, Pengertian Isi, Sejarah, dan Pencetusnya*" <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-4-pilar-kebangsaan.html>
- "*Banyaknya Sesat Pikir Dalam Pilpres 2019*" Akademi Ilmuan Muda Indonesia (ALMI) <https://theconversation.com/banyaknya-sesat-pikir-dalam-kampanye-pilpres-2019-104859>
- "*62 berita hoax yang teridentifikasi Kominfo*", <https://news.detik.com/berita/d-4368351/62-hoax-pemilu-2019-teridentifikasi-kominfo-ini-daftar-nya>.
- "*Awal Cerita Ratna Sarumpaet Bohong Dipukuli Orang*" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181003155248-20-335366/awal-cerita-ratna-sarumpaet-bohong-dipukuli-orang>.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2017